RENCANA KERJA
(RENJA)
TA 2026

INSPEKTORAT DAERAH KAB. SOLOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Inspektorat disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang telah tersusun ini merupakan rencana program dan kegiatan tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta merupakan implementasi atas Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, proyeksi tahun berjalan serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini semakin mengukuhkan tekad, semangat dan komitmen aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan tekat, semangat dan komitmen yang disertai dengan kejujuran, profesionalitas dan integritas yang tinggi, upaya pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 terlaksana berkat kolaborasi dari berbagai pihak, mengingat keterbatasan yang ada maka saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnan dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Kami berharap semoga Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, Maret 2025
INSPEKTUR DAERAH



DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19840414 201101 1 010

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
	DAFTAR TABEL	iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2 Landasan Hukum	3
	I.3 Maksud dan Tujuan	5
	I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	7
	II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	II.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	31
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	37
	III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
	III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
	III.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	46
BAB V	**PENUTUP**	49

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Solok.....	9
Tabel TC-30	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	15
Tabel TC-31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	23
Tabel TC-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	32
Tabel TC-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	41
Tabel	Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD merupakan hal yang sangat penting di dalam menunjang proses pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tahun 2026 menjadi langkah operasionalisasi dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025, serta tahun ke 5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan. RPJMD 2021–2026 serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 menjadi pedoman guna mewujudkan suatu keadaan yang ingin dicapai kemudian dijabarkan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengawasan internal oleh semua aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Dengan kata lain Rencana Kerja ini adalah merupakan acuan atau pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok di dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi organisasi serta kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026. Sejalan dengan itu juga merupakan gambaran target yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selama Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dilakukan secara teknis oleh aparatur Bagian

Perencanaan dan Keuangan dengan melibatkan semua sub bagian yang ada di Inspektorat Daerah.

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannnya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah secara hierarki berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Untuk mewujudkan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta keselarasan antar dokumen perencanaan, maka Renja Perangkat Daerah dilakukan pendampingan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Solok kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi dan reviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan RKPD Kabupaten Solok tahun 2026, RKPD kementerian dan lembaga serta RKPD Propinsi. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RKPD dan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat berperan penting dalam mewujudkan visi

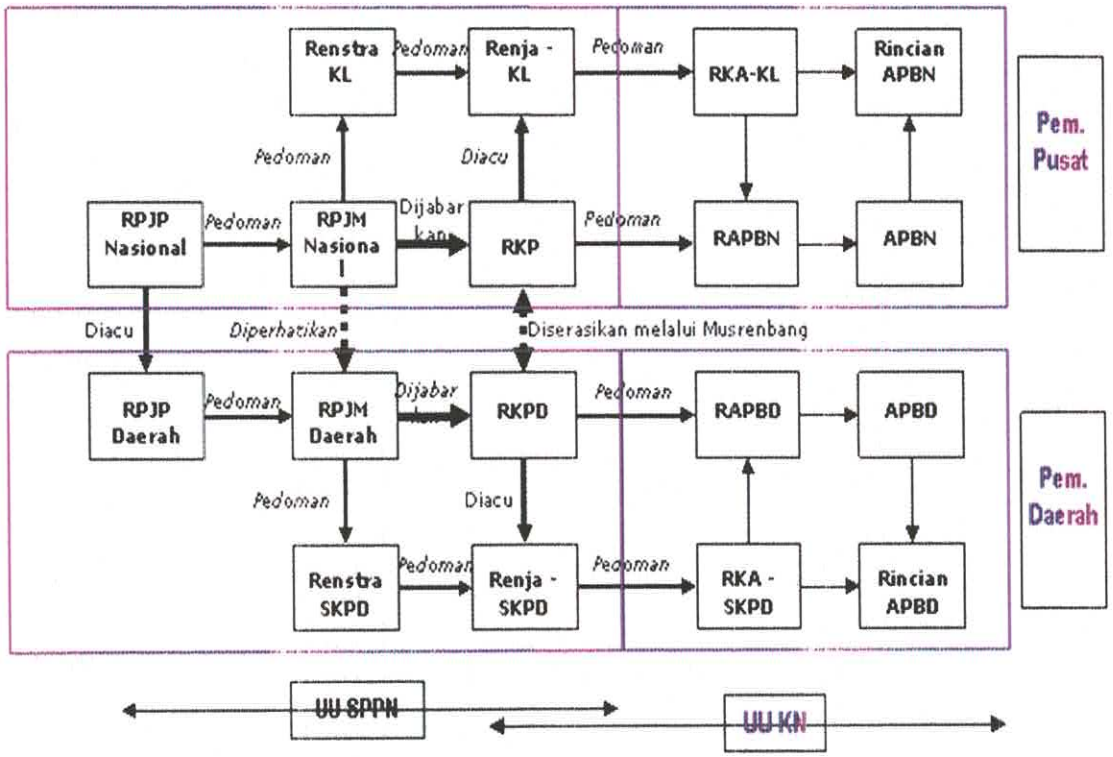
Kepala Daerah melalui Misi Daerah yang ke 4, yaitu:

Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Ilustrasi keterhubungan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, RKPD Kementerian Lembaga dan RKPD propinsi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan



I.2.LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2026 Inspektorat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006 –2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 telah sesuai dengan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 serta selaras dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2021 dan 2026.

Tujuan

Penyusunan Rencana kerja ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman, serta pola tindak dari seluruh Aparatur Inspektorat Daerah serta sekaligus memberikan gambaran tentang sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Hal ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2026, sehingga diharapkan dapat dicapai secara optimal.

Disamping itu rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan 1 (satu) tahun kedepan supaya terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan program pengawasan yang telah ditetapkan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabiiitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran Kinerja Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil *(outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Solok serta proyeksi capaian tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun2025	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan									
	Bidang Pengawasan									
4.1.2.6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45 Laporan	35 Laporan	10 Laporan	24 Laporan	240%	15 Laporan	74 Laporan	170%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan	86 Laporan	10 Laporan	62 Laporan	620%	15 Laporan	163 Laporan	340%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	6 Laporan	2 laporan	4 Laporan	200%	2 Laporan	12 Laporan	100 %
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 laporan	84%
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Nagari	130 Laporan	35 Laporan	25 Laporan	26 Laporan	104%	30 Laporan	60 Laporan	70%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang	51 Kesepakatan	42 Kesepakatan	8 Kesepakata	18 Kesepakata	225%	12 Kesepakatan	37 Kesepakatan	142%

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	37 dokumen	8 Dokumen	17 Dokumen	213%	8 Dokumen	62 Dokumen	130%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	7 Laporan	59%
	Pengawasan DenganTujuanTertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	147 Laporan	51 Laporan	25 Laporan	12 Laporan	48%	25 Laporan	88 Laporan	60%
4.1.2.6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**									
	Pendampingan dan Asistensi									
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	156 Perangkat Daerah	78 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	100%	26 Perangkat Daerah	130 Perangkat daerah	84%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	18 Kegiatan	3 Kegiatan	18 Kegiatan	600%	3 Kegiatan	39 Kegiatan	217%
	Unsur Penunjang									
	Urusan Pemerintah Daerah									
4.1.1.xx.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66 Laporan	34 Laporan	11 Laporan	14 Laporan	128%	11 Laporan	59 Laporan	90 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2520 OB	1260 OB	420 OB	434 OB	104%	420 OB	2114 OB	84 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1 Paket	2 Paket	200%	1 Paket	9 paket	150%
	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	21 Paket	10 Paket	16 Paket	160%	10 Paket	47 Paket	94%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12Paket	60 Paket	84 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	36 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12Paket	60 Paket	84 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	36 laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 laporan	84%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	17 Laporan	71%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	36 laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 laporan	84 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	84 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	20 Unit	4 Unit	5 Unit	120%	6 Unit	31 Unit	87%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	84%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok pada umumnya sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Pada umumnya target kinerja tahunan program dan kegiatan dapat terpenuhi, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

   Merupakan program yang memuat aktivitas utama Inspektorat Daerah, terdiri dari pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP. Keseluruhan agenda pengawasan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang disusun dengan terlebih dahulu menganalisis risiko dari objek pengawasan. Capaian kinerja diukur dari jumlah pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT berbasis risiko. Agenda pengawasan Inspektorat ada yang bersifat rutin sesuai kebijakan pengawasan internal dan ada yang bersifat *Mandatory*, dimana tugas mandat tersebut wajib dilaksanakan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berisi agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Sasaran kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Kegiatan monitoring, evaluasi, pendampingan dan asitensi diarahkan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah serta pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berisi kegiatan-kegiatan rutin dalam bentuk dukungan pelaksanaan operasional perkantoran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan atau kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tingkat capaian kinerja Inspektorat tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel TC-30
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				n-2 Tahun 2024	n-1 Tahun 2025	n Tahun 2026	n+1 Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi			1,9	2,0	2,2		N/A				Tahun 2027 sudah RPJP dan RPJMD baru
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko			90%	100%	100%		100%	90%	100%		
3	Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"			65%	70%	75%		34,61%	65%	70%		
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal			64%	66%	70%		82,25%	85%	87%		
5	Persentase penyelesaian tindaklanjuthasil audit internal			83%	84%	85%		81,83%	85%	87%		
6	Persentase Laporan keuangan OPD yang direview sesuai SAP			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
7	Persentase RKA SKPD yang sesuai RKPD			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
8	Indeks Kepuasan Aparatur			3,22	3,46	3,53		3,22	3,30	3,46		

Penjelasan capaian indikator kinerja setiap Sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran dengan capaiannya adalah sebagai berikut:

   a. Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

      Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Target indikator Indeks Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi tahun 2024 ditetapkan sebesar 1,9. Realisasi tahun 2024 tidak dapat diketahui dikarenakan Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi yang didapatkan dari salah satu elemen data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sejak tahun 2023 elemen tersebut tidak lagi dimasukkan dalam PMPRB. Dengan demikian tidak dapat ditampilkan realisasi dan capaian kinerja atas indikator Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi.

   b. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan risiko

      Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko diperoleh dari hasil evaluasi atas penyusunan dokumen Rencana Tindaklanjut Pengendalian (RTP). Berdasarkan hasil Reviu penyusunan Dokumen RTP tahun 2024 , dari 40 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Solok yang terdiri dari 26 SKPD dan 14 Kecamatan, semuanya telah berhasil menyusun dokumen RTP dan telah di reviu. Berdasarkan target kinerja

sebesar 90% perangkat daerah yang menyusun dokumen RTP, sebanyak 40 dari 40 perangkat daerah telah menyusun dokumen RTP atau sudah mencapai angka 100%, dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja 2 adalah 111%.

2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dengan1 (satu) Indikator Kinerja sasaran yaitu Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"

   Berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapatkan bahwa 9 OPD (34,61%) memiliki nilai BB, sebanyak 17 OPD (65,39%) mendapat nilai B. Selanjutnya, dari perbandingan antara realisasi sebesar 34,61% dengan target tahun 2024 sebesar 70% diperoleh capaian kinerja sebesar 49,44%.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja sasaran dengan capaian sebagai berikut:

   1. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Audit Eksternal

      Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal didapatkan berdasarkan rekapitulasi hasil pembahasan tindaklanjut yang dilakukan oleh BPK RI bersama Inspektorat Daerah Berdasarkan data dari BPK RI yang dihimpun oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, nilai tindaklanjut temuan BPK RI per tanggal 31 Desember 2024 adalah 82,25%. Berdasarkan data tersebut, dengan tingkat capaian tindak lanjut hasil audit eksternal sebesar 82,25%, jika dibandingkan dengan target capaian sebesar 85%, maka tingkat capaian atas indikator kinerja 4 adalah sebesar 96,76%.

2. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Audit Internal

   Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit Internal didapatkan berdasarkan hasil rekapitulasi data jumlah tindaklanjut audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Berdasarkan rekapitulasi data tindaklanjut hasil audit internal dari Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah didapatkan hasil bahwa rata-rata tingkat capaian tindak lanjut hasil audit internal adalah 81,83%. Jika dibandingkan dengan target capaian sebesar 85%, maka tingkat capaian atas indikator kinerja 5 adalah sebesar 96,27%

3. Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP

   Capaian kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD yang direviu sesuai SAP didapatkan berdasarkan hasil review APIP terhadap Laporan Keuangan OPD tahun 2023. Berdasarkan hasil review dimana 100% OPD telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP telah memenuhi target sebesar 100%, dengan demikian tingkat capaian atas indikator kinerja 6 adalah 100%.

4. Persentase RKA OPD yang sesuai dengan RKPD

   Indikator Kinerja Persentase RKA OPD yang sesuai dengan RKPD didapatkan berdasarkan hasil reviu APIP terhadap dokumen RKA Perubahan OPD tahun 2024. Berdasarkan hasil review RKA, dari 40 SKPD seluruh SKPD (100%) telah sesuai antara RKA dan RKPD. Dengan membandingkan antara capaian sebesar 100% dan target 100%, maka tingkat capaian atas indikator kinerja 7 adalah sebesar 100%.

4. Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran dengan capaian sebagai berikut:

   1. Indeks Kepuasan Aparatur

      Indeks Kepuasan Aparatur didapatkan berdasarkan survey kepuasan terhadap layanan kesekretariatan. Survey dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 10 unsur yang dinilai kepada seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil survey diatas didapatkan Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 3,22, jika dibandingkan dengan target sebesar 3,22 maka didapatkan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai penyelenggara pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengawasan internal sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Nagari. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, Inspektorat Daerah turut berperan dengan cara :

1. *Quality Assurance*, yaitu APIP mampu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
2. *Early Warning System*, APIP mampu memberikan bimbingan pada manajemen terhadap pengendalian risiko dan menjamin program yang sedang dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan.
3. *Consulting*, APIP mampu menyampaikan saran dan rekomendasi guna perbaikan sehingga mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) :
    1) Belum seimbangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dibandingkan dengan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan, dimana jumlah jabatan fungsional tertentu saat ini sebanyak 25 orang sedangkan kebutuhan sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebanyak 77 orang
    2) Komposisi jenjang jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok berbentuk piramida terbalik, dimana jumlah Auditor Muda dan Madya lebih banyak dibanding Auditor Pertama.
    3) Auditor berlatar belakang pendidikan Teknik Sipil masih minim, sehingga dalam pelaksanaan cek fisik dilapangan masih sangat kurang.

2. Sarana Prasarana :
    a. Perangkat Pendukung Teknologi Informasi penunjang pelaksanaan pengawasan seperti laptop, printer dan scanner masih belum memadai.
    b. Sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan belum memadai, hal ini dikarenakan luasnya jangkauan kegiatan pengawasan (74 Nagari).
    c. Fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang representatif belum memadai, seperti ruang rapat dan ruang Inspektur Pembantu.
3. Anggaran :

    Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi pagu Anggaran penunjang tugas pengawasan sebesar 0,75 % dari jumlah APBD Kabupaten Solok sesuai acuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah mengemban Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.** Dalam mengemban misi tersebut Inspektorat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berimplikasi kepada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan program yang disertai dengan indikator kinerja pada masing masing komponennya. Gambaran terhadap Misi, Tujuan, Sasaran dan program Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tabel berikut:

Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Inspektorat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	Mewujudkan Penyeenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%
			Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pembinaan APIP terhadap Audity	100%

Untuk pencapaian Tujuan, sasaran dan Program pada RPJMD, dijabarkan dalam rumusan program pada RKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan					Urusan Pemerintahan					
	Bidang Pengawasan					Bidang Pengawasan					
I	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Kab Solok	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%	**2.195.594.419**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Kab Solok	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%	**2.195.594.419**	
I.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab Solok			**1.834.416.419**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab Solok			**1.834.416.419**	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	165.288.156	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda	10 Laporan	165.288.156	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	269.445.059	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pem Daerah	10 Laporan	269.445.059	

	Reviu Laporan Kinerja	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	66.500.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	66.500.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	38.200.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	38.200.000	
	Pengawasan Desa	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Nagari	25 Laporan	208.300.000	Pengawasan Desa	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Nagari	25 Laporan	208.300.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Solok	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	12 Kesepakatan	888.260.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Solok	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	12 Kesepakatan	888.260.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Solok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	198.423.204	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Solok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	198.423.204	

I.2	**Penyelenggarn Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Kab Solok			**361.178.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Kab Solok			**361.178.000**	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.228.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.228.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	310.950.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	310.950.000	
II	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			**572.412.450**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			**572.412.450**	
II.1	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			**572.412.450**	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			**572.412.450**	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Solok	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, & Penilaian Reform Birokrasi	26 Perangkat Daerah	157.090.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Solok	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendmpingn, Asistensi, Verifikasi, dan	26 Perangkat Daerah	157.090.000	

								Penilaian Reformasi Birokrasi			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Solok	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	415.322.450	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Solok	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	415.322.450	
	Unsur Penunjang					Unsur Penunjang					
	Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Solok			**7.097.042.687**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Solok			**7.097.042.687**	
III.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab Solok			**288.642.040**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab Solok			**288.642.040**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kab Solok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11 Laporan	288.642.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab Solok	Jumlah Laporan Capaian	11 Laporan	288.642.040	

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
III.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab Solok			**5.525.390.427**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab Solok			**5.525.390.427**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Solok	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 OB	5.525.390.427	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Solok	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 OB	5.525.390.427	
III.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Solok			**1.074.619.462**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Solok			**1.074.619.462**	
	Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.975.350	Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan	1 Paket	4.975.350	

								Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	366.237.557	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	366.237.557	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	171.367.349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	171.367.349	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Solok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	69.123.206	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Solok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	69.123.206	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	462.916.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	462.916.000	
III.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			**42.246.350**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			**42.246.350**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	9.583.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	9.583.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.862.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.862.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.800.000	
III.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			**166.144.408**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			**166.144.408**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab Solok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	6 Unit	143.617.204	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab Solok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	143.617.204	

	kendaraan dinas operasional atau lapangan		dan Perizinannya			kendaraan dinas operasional atau lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Solok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	22.527.204	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Solok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	22.527.204	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

Inspektorat sebagai institusi pendukung untuk fungsi pengawasan, tidak melakukan forum konsultasi publik dalam penyusunan renja tahun 2026, sehingga tidak memiliki usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan untuk tahun 2026. Rumusan program pada Renja 2026 lebih diarahkan kepada keberlanjutan dan kesinambungan pelaksanaan pengawasan internal yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

Rumusan usulan Program tahun 2026 dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya serta kajian internal terhadap kelemahan-kelemahan yang ada untuk dilakukan perbaikan pada periode berikutnya. Rumusan usulan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan				
	Bidang Pengawasan				
I	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Kab Solok	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100%	
I.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab Solok			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	
	Pengawasan Desa	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Nagari	30 Laporan	

	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Solok	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	12 Kesepakatan	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Solok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	
I.2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Kab Solok			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	
II	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			
II.1	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab Solok			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Solok	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26 Perangkat Daerah	

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Solok	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	
	Unsur Penunjang				
	Urusan Pemerintah Daerah				
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Solok			
III.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab Solok			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Solok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	
III.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab Solok			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Solok	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 OB	

III.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Solok			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Solok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Solok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
III.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Solok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
III.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Solok			
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Solok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Solok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Solok mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah adalah Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan perlunya koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Koordinasi dimaksud dilakukan terhadap aspek perencanaan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Koordinasi tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh kementrian teknis, lembaga pemerintah non kementrian dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah seperti ; fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko, Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh APIP harus bedasarkan kompetensi yang dimilki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk membantu Kepala Daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok untuk kurun waktu lima tahun 2021-2026 adalah :

1. **Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel**
2. **Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tentunya dibutuhkan program-program yang diperlukan untuk menunjang pencapaiannya. Selain itu masing-masing program juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian program, dimana masing-masing kegiatan memiliki indikator kinerja serta sasaran, untuk pencapaian

itu semua diperlukan pendanaan yang memadai. Berikut daftar Program, Kegiatan dan sub kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    c. Reviu Laporan Kinerja
    d. Reviu Laporan Keuangan
    e. Pengawasan Desa
    f. Kerjasama Pengawasan Internal
    g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi
    a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Indikator dan Pagu dana Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 sebagaimana tabel 6 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inspektorat Daerah				**9.865.049.556,00**				**11.002.000.000,00**
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.865.049.556,00**				**11.002.000.000,00**
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**9.865.049.556,00**				**11.002.000.000,00**
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		-	**7.097.042.687,00**			-	**8.061.000.000,00**
6 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		-	**288.642.040,00**		-	-	**300.000.000,00**
6 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Solok	11 Laporan	288.642.040,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11 Laporan	300.000.000,00
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-		-	**5.525.390.427,00**		-	-	**6.000.000.000,00**
6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Solok	420 Orang/bulan	5.525.390.427,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	420 Orang/bulan	6.000.000.000,00
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		-	**1.074.619.462,00**		-		**1.506.000.000,00**
6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Solok	1 Paket	4.975.350,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	6.000.000,00
6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Solok	12 Paket	366.237.557,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	750.000.000,00
6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Solok	12 Paket	171.367.349,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	180.000.000,00

6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Solok	12 Paket	69.123.206,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Paket	70.000.000,00
6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Solok	12 Laporan	462.916.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	500.000.000,00
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-	**42.246.350,00**		-	-	**45.000.000,00**
6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Solok	4 Laporan	9.583.750,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Laporan	11.000.000,00
6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Solok	12 Laporan	30.862.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	32.000.000,00
6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Solok	1 Laporan	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	2.000.000,00
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-	**166.144.408,00**		-	-	**210.000.000,00**
6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Solok	6 Unit	143.617.204,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6 Unit	150.000.000,00
6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Solok	1 Unit	22.527.204,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Unit	60.000.000,00
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	-		-	**2.195.594.419,00**			-	**2.291.000.000,00**
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	-		-	**1.834.416.419,00**		-	-	**1.889.000.000,00**
6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Solok	15 Laporan	165.288.156,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Laporan	170.000.000,00
6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Solok	15 Laporan	269.445.059,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15 Laporan	280.000.000,00

6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab Solok	2 Laporan	66.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	70.000.000,00
6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab Solok	1 Laporan	38.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Laporan	39.000.000,00
6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Solok	30 Laporan	208.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	30 Laporan	240.000.000,00
6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab Solok	12 Kesepakatan	888.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Kesepakatan	890.000.000,00
6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Solok	8 Dokumen	198.423.204,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Dokumen	200.000.000,00
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	-		-	**361.178.000,00**		-	-	**402.000.000,00**
6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian								
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab Solok	2 Laporan	50.228.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	52.000.000,00
6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Solok	25 Laporan	310.950.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	25 Laporan	350.000.000,00
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	-		-	**572.412.450,00**			-	**650.000.000,00**
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	-		-	**572.412.450,00**		-	-	**650.000.000,00**
6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Solok	26 perangkat daerah	157.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	26 perangkat daerah	200.000.000,00
6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Solok	3 Kegiatan	415.322.450,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Kegiatan	450.000.000,00
				J U M L A H	**9.865.049.556,00**				**11.002.000.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan komitmen Inspektorat Daerah dengan seluruh jajarannya untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sararan stratejik yang telah ditetapkan. Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran maka perlu ditentukan Program, Kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok serta Rencana Staregis dan RPJM Kabupaten Solok, maka untuk Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Solok menetapkan Rencana Kerja Tahun 2026. Rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut.

Rencana Kerja dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**888.260.000**
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**888.260.000**
		Kerjasama Pengawasan Internal	888.260.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**572.412.450**
		Pendampingan dan Asistensi	**572.412.450**
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	157.090.000

		Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	415.322.450
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**116.728.000**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**66.500.000**
		Reviu Laporan Kinerja	66.500.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**50.228.000**
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.228.000
Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit eksternal	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**1.190.606.419**
	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit internal	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**879.656.419**
	Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	198.423.204
	Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD	Pengawasan Desa	208.300.000
		Reviu Laporan Keuangan	38.200.000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	269.445.059

		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	165.288.156
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**310.950.000**
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	310.950.000
Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.097.042.687**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.619.462
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.525.390.427
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	42.246.350
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.144.408
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.642.040
JUMLAH			**9.865.049.556**

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 ini dibuat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2026 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Renja Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Solok dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin aparatur selaku eksekutor pelaksanaan kegiatan. Dengan semangat, tekad serta komitmen untuk pencapaian tujuan, diharapkan sumber daya yang ada dapat secara efektif dan efisien berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya untuk kedepannya agar tujuan dan sasaran bisa tercapai secara optimal, diperlukan saran perbaikan antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan anggaran untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat terealisasi 100%.
2. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada Inspektorat Daerah.
3. Dengan berkembangnya peran Inspektorat sebagai *Early Warning System, quality assurance* dan *consulting* menjadikan kegiatan pengawasan semakin luas ruang lingkupnya sehingga perlu diiringi dengan pengalokasian Anggaran yang memadai untuk pelaksanaannya.

4. Diperlukan komitmen bersama dengan OPD terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kita mengharapkan saran-saran perbaikan tersebut dapat secara serius menjadi perhatian bersama dan berkomitmen untuk menindaklanjuti saran perbaikan sehingga diharapkan semakin terjadi perbaikan kepada kondisi sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya diharapkan semoga Renja ini akan dapat dijadikan kaidah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Tahun 2026

Arosuka, Maret 2025
INSPEKTUR DAERAH,

DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19840414 201101 1 010